

“Kalau semua sepakat korupsi itu salah, kenapa ia terus terjadi bahkan di antara orang yang paham agama?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Empat Lensa Membaca Timbangan yang Goyah"

Pekan ini linimasa dipenuhi kabar yang seolah berulang: gelombang operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah sampai memicu wacana meninjau ulang aturan pemilihan, dan dugaan penyelewengan dana program makan bergizi anak sekolah yang menyeret sejumlah nama. Reaksi publik nyaris seragam — marah, jijik, lelah. Tetapi kemarahan yang seragam justru menyembunyikan pertanyaan yang lebih sulit. Jika hampir semua orang,

lintas agama dan ideologi, sepakat bahwa mencuri uang publik itu salah, mengapa praktik itu tidak kunjung berhenti? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu disiplin saja. Ia menuntut beberapa lensa yang, ketika ditumpuk, saling menunjukkan celah masing-masing.

Lensa pertama datang dari ilmu ekonomi kelembagaan: korupsi bertahan karena insentifnya rasional. Ketika peluang menyimpang besar, pengawasan lemah, dan hukuman jarang menyentuh yang kuat, maka menyimpang menjadi pilihan yang "masuk akal" secara biaya-manfaat. Implikasinya, solusi harus struktural — perkuat audit, transparansi anggaran, dan penegakan. Tetapi celah lensa ini tampak jelas: banyak sistem dengan pengawasan ketat pun tetap bocor, karena pengawas sendiri bisa dibeli. Pertanyaan yang muncul: siapa yang mengawasi para pengawas, dan apa yang menjaga integritas mereka ketika tidak ada yang melihat?

Lensa kedua datang dari sosiologi: korupsi bertahan karena ia terlembaga dalam norma. Ketika "amplop" dianggap wajar, ketika menolak gratifikasi justru dianggap sok suci, maka individu jujur menghadapi tekanan sosial untuk ikut arus. Implikasinya, perubahan harus kultural, bukan sekadar regulatif. Namun celahnya: norma tidak berubah dengan kuliah etika. Norma berubah ketika ada individu-individu yang berani menanggung biaya sosial karena menolak ikut. Pertanyaan yang muncul: dari mana keberanian individual itu lahir, jika bukan dari sesuatu yang lebih dalam daripada perhitungan sosial?

Lensa ketiga datang dari psikologi moral: manusia sangat piawai merasionalisasi. Konsep *self-deception* menjelaskan bagaimana seseorang bisa menyelewengkan dana anak sekolah sambil tetap merasa dirinya orang baik — "ini cuma prosedur", "semua juga begitu", "toh saya juga bersedekah". Prinsip *tazkiyatun nafs* dalam tradisi Islam menyentuh titik yang sama: penyakit hati yang tidak dirawat akan memutarbalikkan penilaian. Implikasinya, integritas adalah kerja batin

terus-menerus, bukan status permanen. Celahnya: kerja batin yang murni privat mudah menjadi alibi untuk tidak mengubah struktur — "yang penting hati saya bersih". Pertanyaan yang muncul: bagaimana menjaga agar penyucian diri tidak berhenti menjadi urusan pribadi yang steril dari tanggung jawab publik?

Lensa keempat datang dari teologi keadilan. Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar kesepakatan sosial yang bisa dinegosiasi, melainkan *mizan* — timbangan objektif yang berakar pada tatanan penciptaan itu sendiri. QS. Ar-Rahmaan: 9 menempatkan perintah menegakkan timbangan tepat di antara ayat tentang matahari dan bulan yang berjalan teratur, seakan keadilan sosial adalah kelanjutan dari keteraturan kosmik. Konsekuensinya paling radikal: ada pengadilan yang tidak bisa disuap, dan setiap hak yang dipangkas akan dikembalikan. Prinsip *amanah* menambahkan bahwa kuasa adalah titipan yang akan ditanya. Celah lensa ini bagi pembaca sekuler jelas: ia mengandaikan iman pada yang gaib. Pertanyaan yang muncul: bisakah masyarakat plural membangun komitmen antikorupsi yang kokoh tanpa semacam sandaran transenden, atau selalu ada titik di mana perhitungan murni duniawi kehabisan alasan untuk tetap jujur saat tidak ada yang melihat?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa yang belum memegang kuasa apa pun? Ternyata banyak, dan konkret. Di organisasi kemahasiswaan, transparansi kas himpunan adalah latihan amanah paling dini — publikasikan pemasukan dan pengeluaran, sekecil apa pun. Di kelas, menolak jual-beli tugas dan menolak titip absen adalah bentuk menegakkan timbangan di skala yang paling dekat. Di magang, mencatat jam kerja dengan jujur dan tidak memanipulasi laporan adalah ujian integritas nyata. Di kos, mengembalikan kembalian yang berlebih dari warung adalah otot kejujuran yang dilatih diam-diam. Poin pentingnya, integritas besar tidak muncul dari keputusan besar sekali seumur hidup, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang membentuk kebiasaan. Mahasiswa yang terbiasa curang di hal receh sedang melatih dirinya untuk kompromi di hal besar kelak.

Yang penting dari empat lensa ini bukanlah menemukan satu jawaban final, melainkan menyadari bahwa lensa mana pun yang dipilih sebagai prioritas, selalu ada lensa lain yang menutupi celahnya. Struktur tanpa manusia berintegritas hanya melahirkan pengawas yang bisa dibeli; integritas tanpa struktur mudah menjadi kesalehan yang steril. Mungkin justru di persimpangan itulah pertanyaan tentang keadilan menjadi menarik — bukan karena ia mudah dijawab, tetapi karena ia menolak untuk selesai.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukannya ini masalah sistem, bukan personal? Nyuruh individu jujur itu naif kalau sistemnya rusak.

A

Sebagian benar — sistem yang rusak memang menekan individu untuk ikut menyimpang. Tapi sistem tidak jatuh dari langit; ia dibangun dan dijaga oleh individu-individu. Reformasi struktural yang paling ambisius pun akhirnya bergantung pada ada-tidaknya orang yang mau menegakkannya saat tidak ada insentif. Personal dan struktural bukan pilihan biner; keduanya saling menopang.

Q · 02

Kenapa harus pakai dalil agama? Bukannya etika sekuler sudah cukup buat bilang korupsi itu salah?

A

Etika sekuler memang cukup untuk merumuskan bahwa korupsi salah. Yang lebih sulit dijawab olehnya adalah: mengapa tetap jujur ketika curang menguntungkan dan tak ada yang tahu? Di titik itu, sandaran transenden menambahkan lapisan motivasi — bukan menggantikan nalar, tapi menopangnya saat nalar kehabisan alasan pragmatis. Ini bukan klaim bahwa orang tak beragama tidak bisa jujur, melainkan pertanyaan tentang fondasi.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan moralisme generik "ayo jadi orang baik"?

A

Moralisme generik berhenti pada imbauan. Artikel ini justru menunjukkan bahwa imbauan saja tidak cukup — ada lapisan ekonomi, sosiologi, psikologi, dan teologi yang masing-masing punya celah. Klaim intinya bukan "jadilah baik", melainkan "setiap solusi tunggal punya titik buta, jadi berhati-hatilah pada siapa pun yang menjual satu obat mujarab".

Q · 04

Bukankah mengaitkan agama dengan urusan kekuasaan dan anggaran justru berbahaya secara politik?

A

Kekhawatiran itu sah, karena agama memang bisa dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan. Tapi yang dibicarakan di sini bukan agama sebagai stempel penguasa, melainkan agama sebagai standar yang justru menuntut penguasa. *Amanah* dalam kerangka ini adalah beban bagi yang berkuasa, bukan tameng. Bahaya muncul ketika arahnya dibalik — dan itu memang harus diwaspadai.

Saya sendiri nggak terlalu religius. Apakah prinsip ini masih relevan buat saya?

A

Relevan, karena keadilan dan amanah bukan monopoli orang religius. Empat lensa tadi bisa dimasuki dari pintu mana pun — kamu bisa berhenti di lensa ekonomi atau sosiologi dan tetap menarik kesimpulan yang bermakna. Lensa teologis ditawarkan sebagai satu cara membaca, bukan tiket masuk wajib. Yang universal di sini adalah kesadaran bahwa timbangan yang goyah selalu dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele.